

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemilihan umum menjadi salah satu proses yang terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia pada era reformasi dan era informasi. Untuk mewujudkan pemilihan umum yang mampu mencapai tujuan utama yaitu kesejahteraan sosial, dibutuhkan partisipasi politik sebagai bentuk kontrol warga negara dalam roda kepemimpinan yang berikutnya (Budiardjo, 2008; Surbakti & Supriyanto, 2013). Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara khususnya pemilih pemula dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, yang dikemas dalam berbagai program kegiatan. Beberapa program kegiatan yang telah dilakukan adalah KPU *Goes to Campus* dan sosialisasi yang dikemas dalam acara pagelaran seni budaya, dengan harapan nantinya partisipasi dari pemilih pemula dapat meningkat dan dapat membentuk kemampuan literasi politik mereka (Dadang, 2018).

Literasi politik berkembang sesuai dengan perkembangan isu-isu yang sedang terjadi di kehidupan sehari-hari, di samping perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Sehingga istilah dari literasi politik tidak hanya dinilai sebagai kemampuan menulis dan membaca saja khususnya berkaitan dengan isu-isu politik (Fattahi, 2005; Pradhana & Diponegoro, 2020). Namun hal tersebut dinilai sebagai sebuah kemampuan yang perlu dikuasai oleh setiap pemilih pemula dalam menanggapi dan mengevaluasi informasi politik secara kritis dan analitis (Shaul, 2017; Georgiadou et al., 2018). Kemampuan literasi politik dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebagai modal bagi pemilih pemula dalam menghadapi permasalahan politik yang sedang terjadi (Saputra & Al Siddiq, 2020).

Literasi politik tidak akan lepas dari pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) yang memiliki peranan krusial untuk mempersiapkan pemilih pemula dalam mendukung dan mengembangkan sistem politik yang bersifat demokratis. Namun pada kenyataannya, pendidikan kewarganegaraan di era informasi saat ini sering kali ditunggangi oleh kepentingan politik dari pihak tertentu, dapat dikatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sejak zaman dulu hingga sekarang lebih berorientasi pada

kepentingan pemerintah dibanding dengan kepentingan masyarakatnya (Cholisin, 2000; Simarmata, 2019). Karena hal tersebut materi dan konsep dari pendidikan kewarganegaraan sangat erat dengan gradasi hegemoni, indoktrinasi, dan mobilisasi politik yang berakibat bobot keilmuannya sangat lemah dan jelas tidak memberikan apa-apa dalam pembentukan sikap, moral, etika, dan mental pemilih pemula (Cholisin, 2000; Maksum et al., 2016). Tidak mengejutkan jika sikap dan budaya demokrasi dari pemilih pemula menjadi kurang berkembang, di samping persebaran informasi politik yang begitu pesat di segala sumber informasi.

Permasalahan politik yang sering kali muncul di kalangan pemilih pemula, salah satunya kesulitan untuk menentukan informasi yang valid dan relevan terhadap perkembangan informasi politik yang ada (York, 2013; Song et al., 2017). Kurangnya pemahaman pemilih pemula terhadap literasi politik memunculkan permasalahan politik, seperti *information politic overload*, *hoax politic*, praktik intimidasi, *money politics*, *black campaign*, dan manipulasi perolehan suara. Hoax menjadi permasalahan politik terbesar yang dihadapi oleh pemilih pemula di seluruh dunia (Song et al., 2017; Lee, 2019; Kamga, 2020).

Perkembangan *hoax* politik yang begitu pesat sebagai akibat adanya *information overload*, beberapa di antaranya disinformasi (Benkler et al., 2017; Bennett & Livingston, 2018; Ireton & Posetti, 2018), misinformasi (Allcott et al., 2019), dan propaganda (Barata & Simanjuntak, 2019; Sutanto, 2019; Tahir et al., 2020). Banyaknya *hoax* politik yang tersebar dan tidak dapat dikontrol, menyebabkan pemilih pemula enggan untuk mencari validitas dan kredibilitas dari sejumlah informasi politik yang ditemukan (Bawden et al., 2009; Firmansyah et al., 2017; Land et al., 2018; Lee, 2019; Ayinde et al., 2020; Bawden & Robinson, 2020). *Hoax* politik ini sering kali dikonsumsi pemilih pemula melalui berbagai macam sumber yang dapat memengaruhi sikap politik, arah dukungan, dan partisipasi politiknya (Aminah & Sari, 2019; Pratama, 2020).

Rendahnya pemahaman literasi politik dan intensitas informasi yang berlimpah, pemilih pemula cenderung tidak memperhatikan kuantitas dan kualitas informasi yang mereka temukan secara *online* (Smith & McMenemy, 2017; Schmitt et al., 2018). Maraknya *hoax* akibat *information overload* dan kurangnya peranan orang tua dalam memberikan pemahaman literasi politik kepada pemilih pemula (Song et al., 2017; Rifaldy

et al., 2019), memicu kekhawatiran pemilih pemula akan informasi politik yang tersebar dan mereka cenderung pasif dalam memberikan hak pilihnya pada pemilihan umum (Knoester et al., 2017; Devina, 2019; Ratnayake & Dilrukshi, 2019). Pasifnya keterlibatan pemilih pemula dalam dunia politik didukung dengan survei yang dilakukan CSIS pada awal November 2017, menyatakan bahwa hanya 2,3 persen generasi milenial yang tertarik dengan isu maupun konten sosial-politik. Litbang Kompas juga menyatakan bahwa sekitar 11 persen generasi milenial yang tertarik menjadi anggota dari partai politik tertentu.

Terlihat pada fenomena pemilihan Presiden Indonesia di tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo) menyatakan sebanyak 181 dari sekitar 700 berita *hoax* yang tersebar di tahun 2019 merupakan berita *hoax* berkategori politik. Perilaku penggunaan media sosial pemilih pemula juga berdampak pada seberapa sering mereka mengonsumsi berita *hoax* (Ulil & Surya, 2019). Tidak jarang kalangan pemilih pemula termakan oleh disinformasi yang dapat membangun opini tertentu, sehingga berimplikasi pada dukungan kubu politiknya sekaligus membenci kubu politik yang lain.

Permasalahan politik juga dipicu akan kehadiran aktor-aktor politik baru dengan basis organisasi religius yang membawa perubahan secara tidak langsung (Lu et al., 2019), terutama terkait dengan partisipasi politik melalui aktivitas sipil di era informasi (Buzogány, 2019). Peran para pemimpin opini (*opinion leader*) sangat penting dalam memperlambat dan mempercepat proses difusi informasi politik dan dakwah (Weissman et al., 2020). Semakin tinggi kemampuan *opinion leader* dalam memengaruhi orang lain, maka semakin tinggi juga usaha untuk memengaruhi perubahan perilaku politik yang terjadi (Huang et al., 2020). Dalam artian ini, ketika *opinion leader* seorang kiai yang merupakan penyebar informasi dakwah, maka secara eksplisit menjadikan dirinya salah satu media pembentuk perilaku religius untuk mengubah tatanan sikap, nilai, dan perilaku umat secara sistematis dan terstruktur (Back et al., 2009; Setiawan, 2014; Brown et al., 2017; Dubois et al., 2020).

Kemampuan dalam berkomunikasi politik menjadi sebuah masalah tersendiri yang harus dihadapi oleh pemilih pemula, sehingga tidak jarang pendapat ataupun dakwah dari aktor-aktor politik menjadi hal yang patut untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam menentukan pilihan politik pemilih pemula. Langkah komunikasi ini memiliki kemungkinan keberhasilan yang tinggi, hal ini sering terjadi pada kontestasi politik yang

ada di Madura (Rozaki, 2004; Zamroni, 2012; KPU, 2016). Di Pulau Madura selain fenomena *information overload* dan *hoax*, permasalahan politik yang lain juga terjadi, yaitu munculnya aktor politik baru yang memberikan dampak pada kontestasi pemilihan umum. Menurut salah seorang informan yang diminta kesaksiannya oleh Bawaslu, ia menyatakan bahwa praktik kompetisi politik di Madura tidak sehat pada pemilu serentak tahun 2019. Terjadi dua bentuk penyimpangan kompetisi politik, di antaranya penyimpangan atas yaitu terkait manipulasi perhitungan suara dan penyimpangan bawah yang terkait praktik politik uang (Hakim & Izitghfari, 2019).

Fenomena di atas menunjukkan permasalahan demokrasi yang sangat serius, mengingat praktik intimidasi dan politik uang terhadap masyarakat akan sangat berdampak pada keleluasaan masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam menciptakan suasana pemilu yang *fair*. Kurangnya pemahaman mengenai literasi politik berdampak pada keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum, diketahui bahwa adanya peran elite lokal dan penyelenggara pemilu setempat dalam proses manipulasi perolehan hasil suara. Dugaan adanya peran elite lokal sering terjadi melalui jejaring sosial dengan tokoh agama (kiai), yang tidak jarang menjadi incaran untuk keberhasilan kampanye oleh pihak tertentu (Husein et al., 2018; Khoiri, 2018). Dalam artian ini, permasalahan-permasalahan yang terjadi di Madura ketika menjelang praktik kompetisi politik, meliputi praktik intimidasi yang biasanya dilakukan oleh *blater* (bajingan) sehingga menimbulkan kekhawatiran dan keterancaman keselamatan masyarakat, *black campaign* (Hanafi, 2020), dan *money politic* yang biasa terjadi di pedesaan dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa (Zamroni et al., 2007; Aspinall & Rohman, 2021).

Fenomena dan problematika di atas terjadi di seluruh wilayah negara Indonesia, seperti permasalahan mengenai data pemilih, kapasitas dan beban kerja petugas KPPS yang terlalu tinggi, distribusi logistik pemilu, data hasil penghitungan suara, dan perdebatan mengenai hasil akhir pemilihan presiden di tahun 2019 (Ardipanto, 2019). Namun problematika yang paling menonjol terjadi di Madura, hal ini dapat dilihat dari 260 laporan penyimpangan tercatat bahwa 87 berasal dari laporan masyarakat Madura. Dalam artian ini partisipasi masyarakat Madura tinggi, berkenaan dengan problematika yang ada di Madura menurut Purnomo rinciannya terdiri dari 45 pelanggaran administrasi

non APK (Alat Peraga Kampanye), 8 pelanggaran etik, dan 26 pelanggaran pidana (Pringgodigdo, 2019).

Beberapa penyebab permasalahan politik yang muncul di Madura, karena kurangnya pemahaman masyarakat khususnya pemilih pemula terkait dengan kemampuan literasi politik (Sutrisno, 2017). Hal ini dapat dilihat mulai dari angka melek huruf masyarakat Madura pada tahun 2016 menurut BPS Jatim yang hanya berputar pada 70%-80% dibandingkan angka melek huruf daerah di luar Pulau Madura yang menyentuh nilai 90%. Rendahnya minat membaca di seluruh kabupaten di Pulau Madura (Helmi, 2019), dapat dilihat dari indeks literasi masyarakat Sampang yang hanya mencapai 6,45% dan menduduki urutan terendah di Jawa Timur (Subhan, 2019), dan menurut hasil survei Universitas Airlangga pada tahun 2019 ada 9 kota atau kabupaten yang dijadikan objek penelitian salah satunya Kabupaten Bangkalan dengan indeks literasi 2,78 yang menduduki peringkat terakhir dari 9 kota atau kabupaten tersebut (Umar, 2021).

Tingkat literasi politik pemilih pemula yang cenderung rendah dan kurang efektifnya pembelajaran kewarganegaraan dalam dunia pendidikan (Hopkins & Coster, 2019), hal ini sangat memungkinkan aktor-aktor politik baru untuk turut berperan dalam kontestasi politik yang berada di Madura. Dapat diketahui bahwa, mayoritas masyarakat Madura memeluk agama Islam (Amrullah, 2015; Hasyim et al., 2019; Nasrullah, 2019) dan juga tidak lepas dari eksistensi pondok pesantren yang dinilai penting oleh masyarakat Madura, baik dalam kegiatan belajar mengajar ataupun manajemen institusinya yang masih terfokus pada tokoh kiai. Eksistensi pondok pesantren menjadi salah satu lembaga pendidikan yang memiliki peranan penting untuk meningkatkan sumber daya manusia, kenyataan ini menempatkan peran kiai pada posisi sentral dan sangat penting di Madura (Syarif, 2016; Hannan, 2018; Khoiri, 2018; Basri, 2020).

Kehadiran kiai di Madura dipandang tidak hanya sebagai subjek yang mengajarkan ilmu agama, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki kekuatan *linuwih*. Eksistensi tokoh kiai di Madura memiliki keterkaitan pada partisipasi politiknya yang cukup sentral, menilik kembali pada kasus SDSB (1991 & 1993), Waduk Nipah (1993), pembangunan Jembatan Surabaya-Madura (2009), hingga isu pembentukan Provinsi Madura (2020) yang menunjukkan betapa pentingnya peran kiai kaitannya dengan sosio-politik yang ada di Pulau Madura (M. I. Zamroni, 2005; I. Zamroni et al., 2007; Husein et al., 2018; Basri,

2020). Peran politik kiai yang cukup kuat di Madura, didukung penelitian oleh Ahmad Fauzi yang menjelaskan bahwa strategi kampanye di Madura yang digunakan oleh tim sukses sebuah partai melalui berbagai upaya, salah satunya memanfaatkan hubungan sosial dengan tokoh ulama atau kiai (Fauzi, 2014).

Tampilnya kiai sebagai aktor politik baru (Makhasin, 2017; Greg, 2018), dapat dilihat pada fenomena munculnya kiai sebagai bupati yang terjadi di empat kabupaten yang ada di Pulau Madura. Di Sumenep pada tahun 2000 terpilih KH. Ramdhan Siradj sebagai Bupati Sumenep, periode berikutnya di Bangkalan pada tahun 2008 terpilih Ra Fuad sebagai Bupati Bangkalan, di Pamekasan pada tahun 2008 terpilih KH. Kholilurrahman sebagai Bupati Pamekasan, di Sampang pada tahun 2013 terpilih KH. Fannan Hasib sebagai Bupati Sampang, sedangkan di Sumenep muncul kembali kiai yang menjabat sebagai bupati dengan terpilihnya KH. Busyro Karim sebagai Bupati Sumenep 2010–2020. Tidak jarang mereka menggunakan modal sosial berupa hubungan sosial dengan *blater* (bajingan), organisasi massa, pengakuan sebagai keturunan kiai ataupun pendahulu, jaringan hubungan sosial dengan kiai beserta pondok pesantren, hubungan dengan mantan bupati maupun DPR, dan rekam jejak mereka. (Zamroni et al., 2007; Setiawan, 2014; Mietzner & Muhtadi, 2020)

Perkembangan dunia politik yang begitu pesat, memicu kekhawatiran pemilih pemula di Madura dengan hadirnya aktor politik baru, dengan basis keagamaan dan relasi sosial di samping maraknya *information overload* dan *hoax* yang beredar (Ireton & Posetti, 2018). Kondisi ini menimbulkan kebingungan dalam menentukan solusi terhadap permasalahan politik yang dihadapinya untuk memberikan hak pilihnya atau disebut juga *swing voters* (Muhtadi, 2019), hal ini sangat menguntungkan bagi elite politik tertentu untuk memanfaatkan situasi tersebut, namun sangat merugikan pada perkembangan sistem politik yang ada (Rompas, 2020). Pada kenyataannya, kampanye yang dilakukan oleh kandidat tidak jarang terfokus pada bagaimana mereka bisa memenangkan suara pemilih, daripada memberikan pemahaman untuk lebih berpikir secara rasional dan kritis. Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, maka diperlukannya suatu pemahaman dan kemampuan mendalam terkait literasi politik bagi masyarakat khususnya pemilih pemula.

Pemenuhan dan pemahaman terkait komponen literasi politik pada pemilih pemula dapat diimplementasikan melalui berbagai macam program atau kegiatan khususnya dalam bidang pendidikan (Cholisin, 2000; Depdiknas, 2002; Pontes et al., 2019). Namun pada kenyataannya terdapat perbedaan model pendidikan yang diterapkan, hal tersebut tetap mempunyai tujuan yang selaras yaitu untuk memberikan pemahaman pemilih pemula terhadap informasi dan masalah politik, serta bertujuan agar nantinya pemilih pemula tidak mudah untuk terprovokasi dan mengalami kekhawatiran terhadap informasi yang tersebar luas dengan berbekal pengetahuan politik yang dimiliki pemilih pemula (Tam, 2016). Pengetahuan politik erat hubungannya dengan pemahaman kritis yang dimiliki pemilih pemula terhadap politik, terkait dengan pemahaman pemilih pemula mengenai politik dan yang berhubungan dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, konsep negara, dan kebijakan publik. Menurut Pradhana & Diponegoro (2020) menemukan bahwa program sosialisasi literasi politik memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan literasi politik pada siswa SMA, literasi politik mereka meningkat dan sikap mereka cenderung lebih aktif dalam menggunakan media sosial untuk mengekspresikan preferensi politiknya.

Dalam konteks literasi politik dapat diimplementasikan salah satunya dengan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) yang dilaksanakan dengan tepat dan benar (Mahmud et al., 2020). Pemahaman terkait pendidikan kewarganegaraan sangat penting dimiliki oleh pemilih pemula dalam menumbuhkan kemampuan literasi politik untuk menyelesaikan kekhawatiran pemilih pemula terkait dengan permasalahan politik yang muncul (Luthfi et al., 2016). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam menumbuhkan pemahaman literasi politik dapat digambarkan melalui perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang dimiliki pemilih pemula untuk mendukung kehidupan demokrasi.

Tentu saja hal di atas tidak akan tumbuh dan berkembang begitu saja, perlunya peran dari beberapa pihak yaitu peran dari lingkungan sekitar pemilih pemula dalam menyosialisasikan urgensi dari pemahaman literasi politik. Dimaksud dengan lingkungan sekitar yakni, peran-peran yang menyelimuti ataupun turut hadir dalam kehidupan pemilih pemula, di antaranya: keluarga (Knoester et al., 2017; Rifaldy et al., 2019), praktisi pengelola informasi (Mehtonen, 2016; Pitty, 2019), dan media (Karman, 2017; Barata &

Simanjuntak, 2019; Sutanto, 2019), serta aktivasi kognitif. Peran ini menjadi sebuah langkah awal pengenalan dunia politik bagi pemilih pemula dalam berkehidupan sosial dan demokratis dan mampu menciptakan kemampuan literasi politik pemilih pemula.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk terhindar dari perilaku penyimpangan yang telah disebutkan diatas dengan mengetahui dan memahami *civic competence* dalam lingkup literasi politik. Didukung dengan pernyataan Cassel & Lo (1997) yang menyatakan bahwa penyebutan lain dari konsep literasi politik meliputi tiga istilah, salah satunya adalah kompetensi sipil (*civic competence*) yang secara singkat dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menganalisis segala masalah dan ketidakadilan sosial secara kritis, sehingga dapat mempersiapkan anak-anak dan remaja untuk lebih aktif berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi. Pada umumnya, kompetensi sipil dipahami sebagai aset penting yang dapat menentukan keterlibatan dan keaktifan masyarakat dengan politik dan dalam kewarganegaraan (Denk & Olson, 2018). Dalam artian ini, kompetensi sipil akan memberikan perhatian lebih pada bidang-bidang yang selama ini terabaikan, di antaranya HAM, kesetaraan dan diskriminasi antar budaya, sistem politik, budaya politik, kebijakan publik, supremasi hukum, dan sebagainya (Diković & Zečević, 2020). Hal tersebut dapat dinilai dengan tiga komponen penyusun dari kompetensi sipil (*civic competence*), yaitu pengetahuan sipil (*civic knowledge*), keterampilan sipil (*civic skill*), dan sikap sipil (*civic attitude*) (Jurs, 2016).

Pengetahuan sipil (*civic knowledge*), secara singkat dapat digambarkan ketika seorang siswa mungkin mengetahui apa saja hak asasi manusia, namun mereka mungkin tidak memahami apa yang sebenarnya terkandung dalam konsep “hak” tersebut, mengapa hak-hak dikodifikasi dalam waktu sejarah, maupun bagaimana mereka berhubungan dengan konsepsi dari suatu negara (Haste et al., 2017). Ketidaktahuan terhadap informasi ataupun berita pemilu dan politik yang tersebar menjadi salah satu pemicu sikap golongan putih (golput) bagi pemilih pemula. Keterampilan sipil (*civic skills*), secara singkat lebih mengarahkan dalam mempertimbangkan perspektif yang berbeda, menginterogasi, dan menafsirkan komunikasi politik, serta mendukung posisi dengan bukti dan argumentasi yang baik. Terdapat pemilih pemula yang tidak sepenuhnya memahami pemanfaatan dari media sosial yang baik dan bijak, kemudian hal ini memicu banyak kemunculan pelaku maupun sasaran berita *hoax*. (Malik et al., 2020).

Sikap sipil (*civic attitude*) sederhananya terdiri dari pengembangan nilai, motif, dan identitas yang mendorong seorang warga negara untuk terlibat secara efektif dalam praktik demokrasi (Youniss & Levine, 2009). Terdapat pemilih pemula yang terlibat aktif dalam gerakan-gerakan politik, namun sikap kefanatikan terhadap salah satu pilihan politiknya acap kali mendatangkan konflik hingga persebaran ujaran kebencian (*black campaign*) terhadap simpatisan calon lain di berbagai media sosial. (Malik et al., 2020). *Civic competence* yang termasuk dalam lingkup literasi politik akan berkaitan dengan bagaimana warga aktif berpartisipasi atau terlibat dalam politik dengan pemikiran kritis dan analitis, hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Terdapat kebutuhan untuk memahami keterkaitan pengetahuan politik dan keterlibatan politik, yaitu kesadaran dan perhatian yang besar terhadap isu politik yang muncul (Dudley et al., 2010).

Menurut Borovoi (2013) terdapat hubungan antara literasi politik dan sikap politik, hal ini terbukti dengan hasil penelitian yang menemukan bahwa semakin banyak informasi politik yang dibaca orang maka semakin tinggi literasi politik yang dapat dilihat dari pengetahuan politik mereka yang nantinya dapat berimplikasi terhadap pengambilan keputusan politik yang dibahas. Sejalan dengan pernyataan dari Shaul (2017) yang menemukan bahwa terdapat korelasi antara pengetahuan politik dan keterlibatan politik, dimana mereka yang memiliki pengetahuan politik lebih tinggi cenderung akan lebih aktif terlibat secara politik melalui tindakan seperti pemungutan suara. Dan studi ini juga menemukan bahwa terdapat kesenjangan demografis dalam distribusi pengetahuan politik.

Sebuah penelitian dilakukan, yang bertujuan untuk mengkaji peran berbagai media dalam menciptakan kesadaran politik di kalangan mahasiswa. Menyebutkan bahwa konsumsi media televisi mencakup buletin berita politik dan berita terkini, urusan politik dan konflik politik, dan *talk show* politik. Radio mencakup program diskusi politik dan berita politik. Media sosial dan surat kabar mencakup informasi dan berita seputar politik yang terkini, diskusi politik, dan isu-isu politik yang sedang terjadi saat ini. Sehingga kesadaran politik sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui media-media tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas Gujrat mengonsumsi media massa untuk hiburan maupun informasi politik, media massa dianggap sebagai sumber informasi yang mempunyai kekuatan untuk mengubah pilihan masyarakat sesuai dengan isu-isu

yang disajikan media kepada audiensnya, sehingga membentuk opini publik sesuai dengan penekanan media pada isu tersebut (Ali et al., 2013).

Dalam hal pemilihan umum, konteks literasi politik diketahui sebagai kemampuan yang dimiliki pemilih pemula untuk mendefinisikan kebutuhan akan esensi politiknya, terutama yang berhubungan dengan preferensi politik dan kampanye (Budiardjo, 2008; Surbakti & Supriyanto, 2013; Putri, 2017). Pemahaman literasi politik yang tinggi (Mahmud et al., 2020), sering kali berhubungan dengan aktivitas membentuk dan menata jaringan pemilih pemula yang lebih rasional dalam proses menentukan keputusan tentang pemimpin yang akan diberikan amanah jabatan atau kekuasaan. Ketika pemilih pemula paham tentang kondisi riil negara dan usaha mereka dalam bertindak dan berperilaku dalam politik, menjadi peluang besar tersendiri bagi pemilih pemula akan berpartisipasi dengan lebih kritis dan rasional (Cholisin, 2000; Luthfi et al., 2016; Georgiadou et al., 2018; Saputra & Al Siddiq, 2020). Berlandaskan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dan data pendukung, peneliti ingin menelaah terkait Tingkat Literasi Politik Pemilih Pemula dalam Kontestasi Pemilu di Madura.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka fokus pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan sipil kalangan pemilih pemula dalam kontestasi pemilu di Madura?
2. Bagaimana tingkat keterampilan sipil kalangan pemilih pemula dalam kontestasi pemilu di Madura?
3. Bagaimana tingkat sikap sipil kalangan pemilih pemula dalam kontestasi pemilu di Madura?
4. Bagaimana tingkat literasi politik kalangan pemilih pemula dalam kontestasi pemilu di Madura?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkenaan pada rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan sipil kalangan pemilih pemula dalam kontestasi pemilu di Madura.

2. Untuk mengetahui tingkat keterampilan sipil kalangan pemilih pemula dalam kontestasi pemilu di Madura.
3. Untuk mengetahui tingkat sikap sipil kalangan pemilih pemula dalam kontestasi pemilu di Madura.
4. Untuk mengetahui tingkat literasi politik kalangan pemilih pemula dalam kontestasi pemilu di Madura.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara garis besar penelitian ini memusatkan pada tingkat literasi politik pemilih pemula di Madura, yang nantinya diharapkan memberi dampak positif bagi penelitian selanjutnya dengan menggunakan penelitian ini sebagai tolak ukurnya. Beberapa manfaat dalam penelitian ini terbagi atas dua kategori, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Adapun uraian dari kedua manfaat tersebut antara lain:

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang Ilmu Informasi dan Perpustakaan, yang berkaitan dengan pemahaman dan kemampuan atas literasi politik bagi pemilih pemula di Madura. Penelitian ini diharapkan dapat diamalkan sebagai dasar dalam melihat bagaimana tingkat literasi politik pemilih pemula di Madura, sehingga dapat mengamati dasar bagaimana pemilih pemula turut berpartisipasi di dunia politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pandangan kepada lingkungan sekitar pemilih pemula, untuk dapat memahami bagaimana tingkat literasi politik pemilih pemula sehingga dapat memaksimalkan peran dari lingkungan sekitar untuk lebih peduli akan pentingnya pemahaman *civic competence* bagi pemilih pemula.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemilih pemula di Madura bahwa pentingnya dalam memahami kemampuan literasi politik, sehingga nantinya dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula secara kritis dan kreatif dalam menanggapi isu-isu politik yang berkembang.

1.5 Tinjauan Literatur

Untuk mengetahui pandangan atas literasi politik pemilih pemula di Madura, maka telaah literatur ini digunakan untuk menjelaskan secara kritis dan mendalam terkait fenomena

yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah makalah ini. Telaah literatur ini mencakup teori maupun konsep yang relevan dengan tingkat literasi pemilih pemula.

1.5.1 Literasi Politik

Literasi politik merupakan seperangkat kemampuan yang dibutuhkan dan penting dimiliki warga negara dalam berpartisipasi di kehidupan publik, dan memahami isu politik yang berkembang dengan kemampuan berpikir secara rasional, empiris, dan kritis (Georgiadou et al., 2018). Menurut Crick (2007) hal tersebut tidak akan lepas dari pemahaman warga negara tentang pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan nilai sosial terkandung (*values*) yang merupakan komponen penyusun dari kemampuan literasi politik. Jika kemampuan literasi politik tidak berakar kuat pada diri setiap warga negara, maka fungsionalitas dan kelangsungan hidup demokrasi dipertaruhkan di dalamnya (Mahmud et al., 2020).

Literasi politik lebih dari sekadar mengajarkan kepada pemuda terkait pendidikan politik dan menjelaskan bagaimana sistem kerjanya, melainkan tentang bagaimana kekuasaan digunakan atau disalahgunakan, bagaimana kepentingan diatur atau diabaikan, dan bagaimana keadilan tumbuh subur atau terhambat (Tam, 2016). Literasi politik dimaknai sebagai literasi informasi yang merupakan konsep kompatibel dan berkaitan erat, maka dari itu perlu diajarkan dan ditekankan secara simultan pada pemuda sehingga memungkinkan mereka tidak hanya berprestasi di bidang akademik, juga memberdayakan mereka untuk menjadi warga negara yang lebih baik dalam membentuk pendapat dan membuat keputusan berdasarkan informasi politik yang relevan, berkualitas, dan valid (Alexander, 2009).

Dalam pengimplementasiannya, literasi politik mencakup kompetensi yang merupakan prasyarat masyarakat untuk berpartisipasi lebih efektif dan aktif dalam dunia politik serta bagaimana merumuskan perubahan ke arah yang lebih baik (Hopkins & Coster, 2019). Pengimplementasian literasi politik dari elemen pengetahuan dapat dihubungkan dengan kemampuan dan pemahaman terkait kewarganegaraan dan kesadaran politik, sehingga penanaman akan urgensi dari literasi politik dapat dilakukan dengan pemberian edukasi atau pendidikan yang sebagai basis pengetahuan politik yang dibutuhkan sebelum memahami situasi yang sebenarnya terjadi dan membuat sebuah keputusan (Puspaningtyas, 2021).

Pengimplementasian literasi politik dari elemen keterampilan meliputi keterampilan intelektual, sosial, dan partisipatif. Keterampilan intelektual mengarah pada wawasan yang luas dan berpikir secara kritis, keterampilan sosial mengarah pada keterampilan yang dimiliki warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban untuk menyelesaikan tanggung jawabnya di dalam kehidupan sosialnya. Dan keterampilan partisipatif, dimaksudkan kemampuan yang diperlukan warga negara dalam berpartisipasi dengan wawasan yang luas, bertanggung jawab, dan aktif, serta komunikatif dalam menggeluti setiap proses politik yang terjadi (Luthfi et al., 2016). Sedangkan, pengimplementasian literasi politik dari elemen sikap dan nilai mengacu pada psikologis seorang individu dalam merespons segala isu politik melalui empati, simpati, dan hal lain yang mengarah pada keterlibatan.

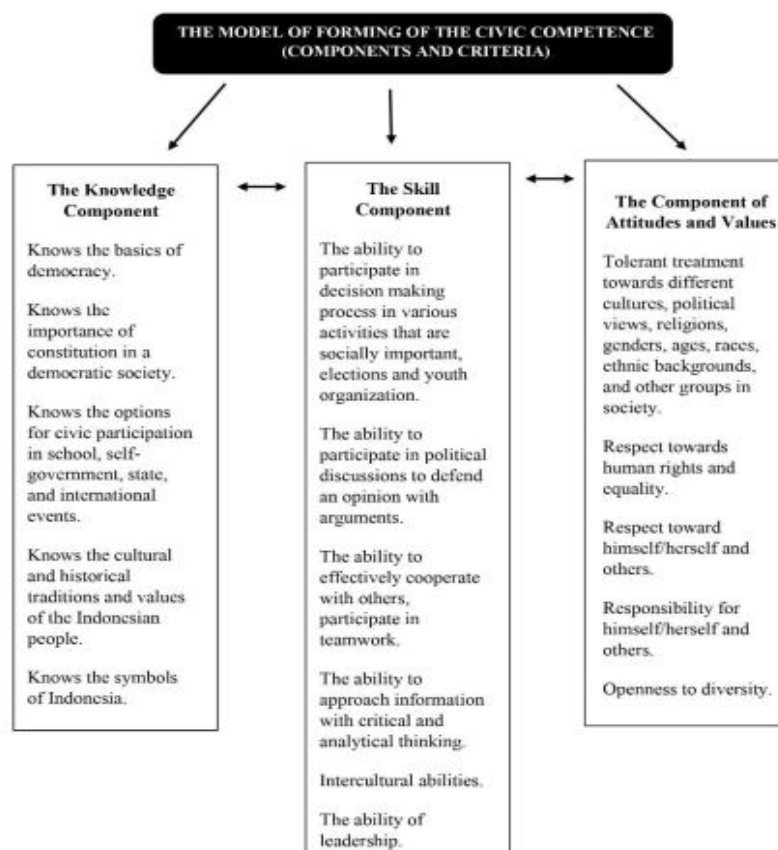
Menurut teori Cassel & Lo (1997), menyatakan bahwa konsep dari literasi politik sama halnya dengan keahlian politik (*political expertise*), kesadaran politik (*political awareness*), dan kompetensi sipil (*civic competence*). Jurs (2014) menggambarkan literasi politik melalui model dari *civic competence*, disebutkan kemampuan ini dapat menumbuhkan kemampuan jangka panjang khususnya dalam lingkup politik, yang membangun warga negara untuk lebih berpartisipasi, berdampak bagi perkembangan politik serta kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa literasi politik merupakan kemampuan yang digunakan untuk mengeksplorasi isu-isu politik dengan melibatkan berbagai komponen sehingga mampu dalam memahami, menganalisa, dan mengambil tindakan dari setiap fenomena politik melalui berbagai media salah satunya media sosial.

Dapat dikatakan bahwa kompetensi sipil (*civic competence*) merupakan kemampuan untuk mengevaluasi segala masalah dan ketidakadilan sosial yang terjadi dengan menganalisis informasi politik secara kritis, sehingga dapat mempersiapkan anak-anak dan remaja untuk lebih aktif berpartisipasi dalam masyarakat demokratis dan politis. Kompetensi sipil paling cocok diukur dengan tes sederhana atas informasi faktual yang netral, karena informasi faktual sangat penting untuk keterlibatan intelektual dengan isu-isu politik. Di samping itu, kompetensi sipil merupakan hal yang mendasar dalam suatu proses dimana warga negara menemukan, mengkaji, dan menggunakan informasi dari lingkungan politik sehingga terbentuk suatu opini.

Jurs (2014) menyatakan komponen utama penilaian atas tingkat literasi politik dapat dilihat melalui pemahaman dan jumlah pengetahuan yang dimiliki, kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang dimiliki, kemampuan dalam mempertahankan argumen, bekerja sama dengan orang lain dan dalam bentuk aksi toleransi atas perbedaan (agama, usia, jenis kelamin, etnis atau pilihan politiknya, dapat menghormati individu lain dan menghargai hak dan kesetaraannya) sehingga komponen utama tersebut dapat membentuk keterlibatan sipil yang lebih aktif dan positif. Terdapat tiga komponen yang tersusun dalam model kompetensi sipil remaja (*The model of youth civic competence*), di antaranya meliputi: pengetahuan sipil (*civic knowledge*), keterampilan sipil (*civic skills*), dan sikap sipil (*civic attitude*) (Jurs, 2014).

Komponen-komponen yang telah disebutkan tersebut menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini, dengan menggunakan model kompetensi sipil remaja oleh Jurs (2014) dalam membentuk kemampuan literasi politik pemilih pemula di Madura, dapat disajikan ke dalam bentuk model sebagai berikut:

Gambar 1.1 Model *Civic Competence*



Sumber: (Jurs, 2014)

1.5.2 Pengetahuan Sipil (Civic Knowledge)

Pengetahuan sipil merupakan kemampuan yang ampuh untuk memahami dunia politik, hanya berdasarkan pengetahuan politik warga negara dapat membentuk opini independen dan berpartisipasi secara kompeten dalam setiap proses pengambilan keputusan (Jurs, 2014). Namun distribusi dari pengetahuan sipil di zaman yang modern ini tidak merata, padahal komponen pengetahuan dalam literasi politik menjadi poin yang penting dan berperan aktif dalam menumbuhkan dan mengembangkan literasi politik. Pengetahuan sipil seorang individu diperoleh melalui proses pembelajaran politik yang dimulai jauh lebih awal. Perilaku politik yang didasari dengan pengetahuan sipil akan menumbuhkan dan memfasilitasi partisipasi politik, pembuatan keputusan politik, dan memungkinkan seorang individu untuk mengartikulasikan kepentingan politik mereka.

Bentuk upaya pengembangan pengetahuan sipil dapat diterapkan melalui pembelajaran politik, yang diartikan sebagai suatu kegiatan yang menumbuhkan orientasi politik pada diri setiap individu. Hal tersebut berawal dari konsep kepercayaan, pengetahuan, dan wawasan politik agar setiap warga negara memiliki kesadaran yang cukup pada isu-isu politik dan sikap politik. Dalam artian ini, ketika ingin meneliti distribusi pengetahuan politik yang tidak merata pada populasi orang dewasa secara umum, maka cukup dengan memperhatikan pembelajaran politik pada anak usia dini. Pendidikan politik menjadi tahapan awal agar setiap individu memiliki kesadaran politik dan mampu bertanggung jawab pada apa yang telah diputuskan. Ketika individu mulai sadar dan memperhatikan isu-isu politik, mereka secara otomatis akan menerima informasi tentang objek politik dan menganalisis informasi secara kritis sehingga menciptakan suatu pengetahuan tentang objek tersebut. Sebagai sebuah konsep, pengetahuan politik mengacu pada kumpulan informasi dan sejauh mana kemampuan individu memiliki informasi yang benar secara faktual tentang isu politik (Jurs, 2014).

Warga negara juga membutuhkan pengetahuan dan pemahaman tentang isu-isu kontroversial, hubungan antar kelompok, proses lokal, dan urusan publik. Ketika hal tersebut terpenuhi, masyarakat akan cenderung memiliki kemampuan yang diperlukan untuk bisa berpartisipasi politik, memantau tindakan pemerintah, dan melaksanakan hak dan tanggung jawab dengan menggunakan pemikiran yang kritis dan analitis (Jurs,

2014). Pengetahuan sipil (*civic knowledge*) secara singkat dapat dilihat pada wawancara kecil yang dilakukan untuk menilai tingkat melek politik warga di Kabupaten Sumenep pada tahun 2015, yang menanyakan perihal siapa penyelenggara pemilihan umum. Dari tiga belas narasumber lima di antaranya masih menjawab selain KPU, hal ini mencerminkan peran dari komponen pengetahuan khususnya terkait dengan politik diperlukan bagi warga negara dalam berpartisipasi politik.

Menurut Jurs (2014) terdapat beberapa penyusun komponen pengetahuan sipil (*civic knowledge*) yang meliputi:

a. Pengetahuan mengenai esensi demokrasi

Pengetahuan terkait esensi dari demokrasi dapat dipahami sebagai pengetahuan terhadap hak asasi manusia, dimana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan tanpa adanya pembatasan dari pihak manapun. Pada indikator ini menjelaskan mengenai pengetahuan esensi dari demokrasi yang termasuk dalam lingkup hak asasi manusia, yang mengarahkan bagaimana sistem kenegaraan dapat mengelola dan mengatur setiap hak dan kewajiban, serta landasan hidup yang dimiliki oleh setiap warga negara.

b. Pengetahuan mengenai urgensi dari konstitusi dalam masyarakat demokratis

Konstitusi nasional menjadi hal yang sangat fundamental dalam berdirinya sebuah negara ataupun kesatuan, hal ini memperjelas akan batasan mengenai sebuah negara, pemahaman atas hak dan kewajiban dari seorang warga negara yang sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Pengetahuan mengenai urgensi dari konstitusi tidak dapat dipisahkan dari literasi politik, dikarenakan hal ini mengacu pada sistem negara yang meliputi kepemimpinan negara, struktural sistem pemerintahan, tugas dan kewajiban lembaga negara dan warga negara. Maka dari itu kemampuan dalam mengetahui dan mengkritisi bentuk-bentuk penyimpangan dalam sistem pemerintahan, menjadi prasyarat pemenuhan indikator ini dalam membentuk sistem pemerintahan yang sehat.

c. Pengetahuan mengenai bentuk-bentuk keterlibatan politik

Pengimplementasian indikator ini dapat berbentuk kemampuan dalam terlibat aktif di setiap kegiatan kampus, organisasi, di lingkungan rumah, atau dimanapun pemilih pemula berada dan sesuai dengan minat dan preferensi politiknya. Pengetahuan mengenai bentuk-bentuk keterlibatan mendukung pemilih pemula untuk bersikap lebih

terbuka terhadap preferensi-preferensi politik yang ada. Hal ini akhirnya membuat mereka lebih mengenal dan paham akan sistem pemerintahan yang ada dan setiap proses politik yang terjadi di dalamnya, hal ini juga melatih untuk dapat mengelola dan menganalisis informasi yang didapatkan oleh mereka.

d. Pengetahuan mengenai Madura

Budaya, sejarah, nilai, dan tradisi menjadi identitas sebuah masyarakat di wilayah tertentu, hal ini yang menjadi pembeda dan ciri khas dari masyarakat tersebut. Pengetahuan mengenai Madura merupakan bentuk kesadaran atas jati diri yang diperlihatkan melalui penghormatan dan penerimaan terhadap budaya yang ada. Pada indikator ini melihat bahwa adanya pencampuran budaya dan nilai politik yang terjadi saat ini merupakan bentuk sejarah panjang yang telah berjalan di sebuah wilayah khususnya di Pulau Madura, sehingga kesadaran atas hal tersebut penting untuk dilestarikan.

e. Pengetahuan mengenai simbol Indonesia

Pengetahuan mengenai simbol Indonesia sebagai bentuk cinta terhadap tanah air dan keseriusan dalam menjalankan setiap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pengetahuan mengenai simbol negara ini sebagai batu pijakan dalam menanamkan dan menumbuhkan rasa kecintaan pemilih pemula terhadap negaranya. Hasil yang didapatkan yaitu munculnya rasa nasionalisme dan patriotisme pada setiap diri pemilih pemula, sehingga mereka mampu dalam menghargai dan menerima setiap perbedaan yang ada, baik dari dalam negara maupun luar negara.

1.5.3 Keterampilan Sipil (Civic Skills)

Pengetahuan dan pemahaman konseptual secara singkat tentang “mengetahui apa”, sedangkan keterampilan sipil secara singkat berkaitan dengan prosedural tentang “mengetahui caranya”. Keterampilan kognitif merupakan kapasitas yang memungkinkan bagi warga negara untuk menganalisis dan menyintesis informasi dan argumen, mengevaluasi, mencapai kesimpulan, serta mengambil dan mempertahankan posisi pada masalah yang menjadi perhatian publik (Jurs, 2014). Beberapa di antaranya mempertimbangkan perspektif yang berbeda, menginterogasi, dan menafsirkan komunikasi politik, dan mendukung posisi dengan bukti dan argumentasi yang baik dan relevan.

Keterampilan kognitif dibutuhkan untuk partisipasi aktif dari warga negara, selain pemahaman tentang alasan pemungutan suara politik, kampanye suatu komunitas, kerja sukarela dan tindakan hukum. Hal-hal tersebut lebih dari sekadar pengakuan, yang artinya keterampilan lebih menekankan pada kemampuan mengambil keputusan yang otonom dan berpikir kritis (Jurs, 2014).

Terdapat berbagai keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi sipil secara efektif, yang dibagi menjadi tiga yaitu keterampilan intelektual, keterampilan partisipatif, dan keterampilan sosio-emosional. Pemuda diharapkan nantinya dapat membuat pilihan politik yang baik, untuk berpartisipasi juga dalam setiap proses pengambilan keputusan kolektif, resolusi konflik, dan negosiasi dalam mendiskusikan masalah sosial-politik yang kontroversial, serta pemantauan setiap tindakan pemerintah dengan mengatasmakan kepentingan publik.

Dengan kata lain, keterampilan merupakan kemampuan untuk mengevaluasi informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh warga negara dalam berpartisipasi politik, menurut Jurs (2014) terdapat beberapa penyusun keterampilan sipil (*civic skills*) dalam membangun kompetensi sipil (*civic competence*) yang dapat digambarkan melalui:

a. Kemampuan untuk berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan di berbagai kejadian dan organisasi sosial

Kemampuan untuk berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan merupakan keterampilan yang memerlukan proses dan pertimbangan tertentu. Keterampilan ini juga didasari dengan pengetahuan mengenai organisasi dan isu politik yang sedang terjadi, dikarenakan kemampuan ini merupakan nilai yang utama dalam pembentukan keterampilan sipil. Pengimplementasian kemampuan ini dapat berupa pembuatan keputusan dalam menentukan pilihan politik pemilih pemula.

b. Keterampilan untuk berpartisipasi dalam diskusi politik

Keterlibatan dalam diskusi politik merupakan sebuah keterampilan yang harus dimiliki, karena di dalam diskusi politik tersebut memerlukan keterampilan dalam mengelola pengetahuan politik yang dimiliki. Keterampilan ini nantinya dapat membentuk pemilih pemula yang mampu untuk mempertahankan setiap argumen dan pendapatnya yang dihubungkan dengan kapasitas informasi yang dimilikinya. Keterampilan ini juga dapat meliputi kemampuan dalam menghubungkan antara

pengetahuan dan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan secara kritis dan analitis.

c. Keterampilan dalam bekerja sama tim atau kelompok sosial secara aktif

Keterampilan dalam bekerja sama tim dapat membangun rasa saling percaya individu dengan individu lainnya. Keterampilan yang dapat dibentuk dalam indikator ini di antaranya kolaborasi, resolusi, komunikasi, negosiasi, penyelesaian konflik, perencanaan, komitmen, dan manajemen waktu. Asumsi yang digunakan ketika keterampilan ini dapat diimplementasikan yaitu pemilih pemula dapat bekerja sama dengan baik untuk menanggapi isu-isu politik dan mampu untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

d. Kemampuan dalam mengevaluasi informasi secara kritis dan analitis

Pemikiran secara kritis dan analitis merupakan suatu kemampuan yang urgen dalam memperhatikan dan menanggapi persebaran informasi politik yang begitu luas dan pesat. Keterampilan ini akan membentuk pemilih pemula mampu dalam mengontrol dirinya atas keputusan dan informasi politik yang mereka temukan, sehingga dapat menilai setiap keterlibatan politik yang ada. Keterampilan ini akan memudahkan dalam menyaring informasi yang ditemukan pemilih pemula di berbagai sumber, sehingga informasi tersebut valid. Keterampilan mengevaluasi secara kritis dan analitis yang baik akan membentuk sebuah kesimpulan yang relevan dengan masalah.

e. Keterampilan antar budaya

Keterampilan ini berkaitan dengan kondisi geografi di sebuah wilayah yang pastinya memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda-beda, sehingga keterampilan ini diperlukan. Keterampilan ini erat kaitannya dengan komunikasi, karena dengan komunikasi dapat tertangkap segala informasi dari orang dengan budaya ataupun tradisi yang berbeda tanpa adanya halangan. Keterampilan ini juga penting dalam mendukung pengetahuan dan pemahaman pemilih pemula mengenai perbedaan-perbedaan yang ada di Pulau Madura.

f. Keterampilan dalam kepemimpinan

Keterampilan dalam kepemimpinan menjadi nilai yang penting dalam literasi politik, hal ini dapat dicerminkan pada pembangunan sistem politik yang dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu dalam mengontrol dirinya sendiri dan orang lain. Keterampilan ini dapat dikembangkan dengan partisipasi aktif dalam mengikuti segala proses politik

yang ada di lingkungan sekitar. Pemimpin yang kreatif, cermat, dan solutif terhadap permasalahan yang terjadi menjadi sosok yang dibutuhkan dalam pembentukan dan pengembangan literasi politik pemilih pemula.

1.5.4 Sikap Sipil (Civic Attitude)

Sikap sipil merupakan kemampuan yang menonjolkan pada pengembangan dari nilai, motif, dan identitas yang mendukung warga untuk terlibat secara efektif dalam segala praktik demokrasi (Jurs, 2014). Dapat dikatakan sikap sipil tentang politik muncul ketika individu memiliki kemampuan untuk menghubungkan bagian-bagian yang berbeda ke dalam konfigurasi kognitif. Dapat dilihat ketika kita memahami bagaimana berbagai peristiwa menciptakan suatu proses dan juga membuahkan suatu hasil tertentu. Misalnya, mengapa hoax politik muncul, mengapa *money politic* masih terjadi? Setelah melalui beberapa proses dihasilkanlah suatu gerakan yaitu “*Say No to Black Campaign*”.

Sikap sipil lebih mengarah pada hubungan antara individu dengan individu lainnya dalam merespons hubungan sosial, kesejahteraan bersama, dan lain sebagainya sehingga dapat menciptakan hubungan timbal balik yang positif. Dalam artian ini, masyarakat tidak hanya memiliki pengetahuan tentang bagaimana elite tertentu memanipulasi berita di internet, namun masyarakat juga harus memiliki pemahaman tentang bagaimana informasi tersebut dapat dikonsumsi secara online.

Warga negara demokratis harus memiliki pemahaman minimal tentang sistem politik di mana mereka dapat mengekspresikan preferensi dan memilih kandidat sesuai dengan keputusan rasional mereka (Jurs, 2014). Secara sederhana, pemahaman terkait sikap dan nilai dapat dilihat dari beberapa penyusun di dalamnya, di antaranya:

a. Toleransi terhadap perbedaan (budaya, preferensi politik, agama, jenis kelamin, usia, ras, latar belakang etnis, dan kelompok lain dalam masyarakat)

Sikap pada indikator ini dapat berupa saling menghormati mulai dari keragaman budaya, agama, jenis kelamin, usia, ras, latar belakang etnis hingga preferensi politik setiap warga negara yang nantinya dapat membentuk toleransi. Toleransi di sini dibutuhkan untuk dapat menciptakan sikap warga negara yang cenderung sadar dan peka terhadap setiap perbedaan yang ada. Pemenuhan terhadap sikap toleransi akan menciptakan rasa saling menghargai dan menghormati, nantinya hal ini menjadi gaya hidup dan hal yang wajar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Penghormatan terhadap HAM dan kesetaraan

Sikap dalam menghormati HAM dan kesetaraan dalam lingkup literasi politik merupakan sesuatu yang wajar dan sebagai bentuk dari keragaman di sebuah wilayah. Bentuk dari indikator ini dapat berupa saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia, adanya perbedaan hak dan kewajiban serta tanggung jawab setiap warga negara. Menghormati kesetaraan dapat dimulai dari diri sendiri dalam menanggapi dan menganggap bahwa setiap warga negara berhak diberikan kesempatan yang sama dalam memenuhi setiap haknya.

c. Penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain

Pada indikator ini meliputi kemampuan dalam menghargai setiap aktivitas ataupun usaha yang telah dilakukan oleh diri sendiri maupun orang lain. Landasan dari indikator ini yaitu saling menghargai, merupakan wujud atas penerimaan kapasitas diri sendiri dan orang lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Menghormati setiap usaha yang dilakukan orang lain nantinya akan membentuk pribadi yang lebih peka dan mampu mengontrol diri sehingga tidak mudah terjerumus pada penyimpangan yang terjadi.

d. Tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain

Pada indikator ini memperlihatkan kemampuan dalam bertanggung jawab atas usaha yang dilakukan dan mampu menyelesaikan seluruh aktivitas di dalamnya. Kemampuan ini dapat meliputi keterlibatan kerja sama tim dan penyelesaian masalah yang ada di dalamnya, serta mampu untuk membantu orang lain. Singkatnya hal ini akan menumbuhkan empati, toleransi, bertanggung jawab, dan rasa saling menghargai.

e. Keterbukaan dalam keragaman

Sikap terbuka ditumbuhkan atas kesadaran dan pemahaman akan pentingnya komunikasi dalam menyuarakan ataupun menyampaikan setiap pendapat dengan penuh tanggung jawab. Sehingga hal ini dapat menciptakan suasana yang harmonis dalam sebuah kelompok atau organisasi. Keterbukaan dalam keragaman ini akan menghasilkan bentuk penerimaan dan reaksi yang wajar atas keberagaman yang ada di lingkungan pemilih pemula.

1.6 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional**1.6.1 Definisi Konseptual****Literasi Politik**

Literasi politik dapat dikatakan sebagai pemahaman dan pengetahuan warga negara terkait dengan isu-isu politik dan segala proses politik yang memungkinkan warga negara dapat terlibat secara aktif dan efektif sesuai perannya sebagai warga suatu negara. Pada intinya literasi politik mengacu pada, sejauh mana seorang individu memberikan perhatian dan pemahaman terkait isu-isu politik dari informasi yang ditemukan dan dianalisis secara kritis. Konsep dari literasi politik sama halnya dengan model kompetensi sipil (*civic competence*) yang dikemukakan oleh Jurs (2014), yang terdiri dari tiga komponen di antaranya:

- **Pengetahuan Sipil (Civic Knowledge)**

Komponen ini lebih menekankan sejauh mana seorang warga negara dalam memperhatikan dan memahami berita maupun informasi politik yang telah berkembang, sehingga dapat membentuk opini tertentu bahwa beberapa informasi tersebut dapat dikatakan benar secara faktual. Terdapat beberapa indikator yang membuktikan bahwa seorang warga negara memiliki pengetahuan sipil, di antaranya:

- a. Pengetahuan mengenai esensi dari demokrasi, dimana esensi dari demokrasi sebagai bukti munculnya sikap dan perilaku politik yang dapat digambarkan berupa keterlibatan politik, hak kebebasan sipil, dan hak politik.
- b. Pengetahuan mengenai urgensi dari konstitusi dalam masyarakat demokratis, dimana mengacu pada pengetahuan terhadap lembaga-lembaga demokrasi menjadi salah satu bagian dari literasi politik yang tidak dapat dihilangkan karena berkaitan dengan sistem negara yang ada.
- c. Pengetahuan mengenai bentuk-bentuk keterlibatan politik, mengacu pada pengetahuan mengenai bentuk partisipasi politik yang aktif dan positif dalam merespons setiap isu politik yang berkembang.
- d. Pengetahuan mengenai Madura, lebih terfokus pada pengetahuan masyarakat mengenai sejarah, budaya, dan nilai-nilai politik yang ada di Pulau Madura.
- e. Pengetahuan mengenai simbol Indonesia, hal ini mengacu pada bukti ataupun ciri khas yang dimiliki Negara Indonesia, mulai dari konstitusi Negara Indonesia sampai dengan dasar Negara Indonesia.

- **Keterampilan Sipil (Civic Skills)**

Komponen ini lebih menekankan sejauh mana keterampilan seorang warga negara dalam memahami dan mengidentifikasi hak dan kewajibannya secara kritis dan rasional. Keterampilan ini membentuk kemampuan yang adaptif, sehingga dapat mengambil suatu keputusan untuk berpartisipasi secara aktif dalam menanggapi dan mengevaluasi isu-isu politik. Keterampilan sipil dapat dinilai dari beberapa indikator penyusun, di antaranya:

- a. Kemampuan untuk berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan di berbagai kejadian dan organisasi sosial, indikator ini merujuk pada kemampuan untuk membuat keputusan dalam berpartisipasi di organisasi kemasyarakatan dan kejadian sosial, kemampuan ini dapat berupa pemahaman tentang organisasi, dan kesadaran akan keterlibatan.
 - b. Keterampilan untuk berpartisipasi dalam diskusi politik, mengacu pada bentuk ekspresi diri dan kemampuan dalam berkomunikasi yang didukung dengan berpikir kritis dan analitis yang baik sehingga dapat mewakili kepedulian akan isu-isu politik.
 - c. Keterampilan dalam bekerja sama tim atau kelompok sosial secara efektif, hal ini menggambarkan pentingnya hubungan sosial sehingga terbentuk keterampilan dalam berkolaborasi, negosiasi, komunikasi, pemecahan masalah, perencanaan, resolusi, komitmen, dan manajemen waktu.
 - d. Kemampuan dalam mengevaluasi informasi secara kritis dan analitis, hal ini merujuk pada optimalisasi pemikiran individu yang kritis dan analitis yang dibutuhkan untuk mencari, menemukan, dan menggunakan informasi.
 - e. Keterampilan antar budaya, merujuk pada keterampilan dalam melihat dan memahami kondisi geografi - demografi.
 - f. Keterampilan dalam kepemimpinan, mengacu pada kemampuan untuk memimpin baik dalam diri sendiri dan organisasi atau kelompok.
- **Sikap Sipil (Civic Attitude)**

Komponen ini berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu dalam mengidentifikasi setiap kejadian politik dan dihubungkan dengan kapasitas informasi dan pengetahuan mereka terkait isu-isu politik, sehingga dapat diimplementasikan ke dalam suatu tindakan nyata. Sikap sipil terbentuk dari beberapa indikator yang di antaranya:

- a. Toleransi terhadap perbedaan (budaya, preferensi politik, agama, jenis kelamin, usia, ras, latar belakang etnis, dan kelompok lain dalam masyarakat), mengacu pada kemampuan dalam mengatasi dan menerima perbedaan yang ada.
- b. Penghormatan terhadap HAM dan kesetaraan, hal ini mengacu pada penerimaan dan pemahaman mengenai hak asasi manusia yang harus diketahui dan dipahami oleh setiap warga negara tanpa memandang bulu, sesuai dengan landasan hukum negara yang berlaku.
- c. Penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain, merujuk pada kemampuan dalam menghargai ataupun menghormati setiap perbedaan pendapat yang ada dalam setiap proses politik.
- d. Tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain, dalam hal ini merujuk pada kesadaran akan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap warga negara, sesuai dengan landasan hukum negara yang berlaku.
- e. Keterbukaan dalam keragaman, mengacu pada sikap keterbukaan terhadap keragaman yang ada dan mampu membentuk lingkungan masyarakat yang harmonis.

1.6.2 Definisi Operasional

Tingkat kemampuan literasi politik pemilih pemula di Madura berdasarkan komponen *civic knowledge*, terdiri dari:

1. Pengetahuan mengenai esensi dari demokrasi
 - a. Tingkat pemahaman kebebasan sipil
 - b. Tingkat pemahaman hak-hak politik
2. Pengetahuan mengenai urgensi dari konstitusi dalam masyarakat demokratis
 - a. Tingkat pemahaman tentang lembaga-lembaga demokrasi
 - b. Tingkat pemahaman mengenai landasan konstitusional negara Indonesia (UUD 1945)
3. Pengetahuan mengenai bentuk-bentuk keterlibatan politik
 - a. Tingkat pengetahuan mengenai isu-isu politik
 - b. Tingkat pengetahuan dasar terkait pemilihan yang demokratis
4. Pengetahuan mengenai Madura
 - a. Tingkat pengetahuan mengenai sejarah Madura

- b. Tingkat pengetahuan terkait budaya politik di Madura
 - c. Tingkat pengetahuan mengenai aktor-aktor politik di Madura
5. Pengetahuan mengenai simbol Indonesia
- a. Tingkat pemahaman akan hukum di negara Indonesia
 - b. Tingkat pengetahuan mengenai dasar negara Indonesia

Tingkat kemampuan literasi politik pemilih pemula di Madura berdasarkan komponen *civic skills*, terdiri dari:

1. Kemampuan untuk berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan di berbagai kejadian dan organisasi sosial
 - a. Tingkat kemampuan berpartisipasi dalam organisasi massa di Madura
 - b. Tingkat kemampuan berpartisipasi dalam setiap kejadian sosial di Madura
 - c. Intensitas keterlibatan dalam setiap kejadian dan organisasi sosial
2. Keterampilan untuk berpartisipasi dalam diskusi politik
 - a. Intensitas partisipasi dalam diskusi politik
 - b. Tingkat keterampilan dalam melakukan diskusi politik
 - c. Tingkat keterampilan dalam menilai setiap keputusan
3. Keterampilan dalam bekerja sama tim atau kelompok sosial secara efektif
 - a. Intensitas partisipasi dalam kerja sama tim atau kelompok
 - b. Tingkat keterampilan dalam menyelesaikan masalah untuk mencapai keputusan bersama
4. Kemampuan dalam mengevaluasi informasi secara kritis dan analitis
 - a. Tingkat kemampuan dalam penemuan informasi
 - b. Tingkat kemampuan dalam menelaah informasi
 - c. Tingkat kemampuan dalam menyimpulkan informasi
5. Keterampilan antar budaya
 - a. Intensitas penguasaan bahasa dan ekspresi diri
 - b. Tingkat keterampilan dalam berkomunikasi
6. Keterampilan dalam kepemimpinan
 - a. Intensitas keterlibatan sebagai pemimpin kelompok
 - b. Tingkat keterampilan dalam mengontrol opini pribadi
 - c. Tingkat keterampilan dalam mengelola opini orang lain
 - d. Intensitas protes hukum dan kebijakan pemerintah

Tingkat kemampuan literasi politik pemilih pemula di Madura berdasarkan komponen *civic attitude*, terdiri dari:

1. Toleransi terhadap perbedaan (budaya, preferensi politik, agama, jenis kelamin, usia, ras, latar belakang etnis, dan kelompok lain dalam masyarakat)
 - a. Tingkat kemampuan dalam menghormati keberagaman
 - b. Intensitas membantu orang lain
 - c. Tingkat kemampuan dalam menyampaikan opini dan aspirasi
2. Penghormatan terhadap HAM dan kesetaraan
 - a. Intensitas menghargai setiap hak asasi manusia
 - b. Tingkat kemampuan dalam menghargai perbedaan gender
3. Penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain
 - a. Tingkat kemampuan dalam menghormati diri sendiri
 - b. Tingkat kemampuan dalam menghormati orang lain
4. Tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain
 - a. Tingkat kemampuan dalam menyelesaikan hak dan kewajiban
 - b. Intensitas partisipasi dalam pemilu
 - c. Intensitas peduli terhadap orang lain
5. Keterbukaan dalam keberagaman
 - a. Tingkat kemampuan memahami kepribadian setiap warga negara
 - b. Tingkat kemampuan dalam merespons setiap keberagaman

1.7 Metode dan Prosedur Penelitian

1.7.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif, fokus penelitian ini pada meneliti sampel dari populasi tertentu, mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen penelitian, setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif, yang nantinya hipotesis dapat disimpulkan terbukti atau tidak. Pada intinya, metode kuantitatif deskriptif akan menyajikan rangkuman data yang dihitung berdasarkan data yang telah terkumpul, rangkuman ini dapat berupa tabel frekuensi, tabel silang, tabel grafik, dan beberapa statistik mendasar seperti mean, modus, median (Agung, 1992; Zulkipli, 2009). Penulis memilih pendekatan ini, karena untuk melakukan perhitungan secara tepat dan cermat terhadap fenomena literasi politik pemilih pemula di Madura, dengan mengumpulkan fakta yang

relevan di lapangan tanpa diadakan pengujian dari teori, dan dapat digunakan sebagai bahan prediksi dan evaluasi fenomena literasi politik pemilih pemula di Madura (Sugiyono, 2018).

1.7.2 Lokasi Penelitian

Pulau Madura terpilih sebagai lokasi penelitian ini karena masyarakat Madura memiliki nilai sosial, politik, dan budaya yang cukup berbeda dan unik dengan wilayah lainnya (Rochana, 2012). Pulau Madura memiliki empat kabupaten di antaranya: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep yang masing-masing dipimpin oleh kepala daerah yaitu bupati. Dengan dipilihnya empat kabupaten tersebut dapat dikatakan telah mewakili bagaimana gambaran maupun tinjauan kondisi nyata tingkat literasi politik dari pemilih pemula di Madura.

Tingkat literasi politik di Madura dapat ditinjau dari angka melek huruf masyarakat Madura pada tahun 2016 yang hanya berputar pada 70%-80% dibandingkan angka melek huruf daerah di luar Pulau Madura yang menyentuh nilai 90% (BPSJatim, 2017). Rendahnya minat membaca di seluruh kabupaten di Pulau Madura (Helmi, 2019), dapat dilihat dari indeks literasi masyarakat Sampang yang hanya mencapai 6,45% dan menduduki urutan terendah di Jawa Timur (Kabarmadura, 2019), dan menurut hasil survei Universitas Airlangga pada tahun 2019 ada 9 kota atau kabupaten yang dijadikan objek penelitian salah satunya Kabupaten Bangkalan dengan indeks literasi 2,78 yang menduduki peringkat terakhir dari 9 kota atau kabupaten tersebut (RRI, 2021). Maka dari itu, peneliti memilih Pulau Madura sebagai lokasi penelitian yang terdiri dari empat kabupaten yang ada di Pulau Madura.

Penelitian ini tidak dilaksanakan di semua kecamatan yang ada di empat kabupaten Pulau Madura, melainkan peneliti memilih perwakilan kecamatan dari setiap kabupaten dengan menggunakan teknik *multistage random sampling*. Teknik ini digunakan dengan membagi banyaknya populasi yang luas ke beberapa tingkatan daerah kecamatan sehingga diperoleh sejumlah sampel dari perhitungan populasi tersebut. Dengan menggunakan Daerah Pemilihan (Dapil) yang berdasarkan pada data pemilu legislatif tahun 2014 dan tahun 2019 di Madura.

Langkah-langkah teknik *multistage random sampling* dapat dilakukan sebagai berikut ini:

1. Melakukan pendataan semua Daerah Pemilihan (Dapil) yang berada di empat kabupaten Pulau Madura, didapatkan sejumlah 36 Dapil yang terbagi berdasarkan kabupaten, di antaranya Kabupaten Bangkalan memiliki 6 Dapil, Kabupaten Sampang memiliki 6 Dapil, Kabupaten Pamekasan memiliki 5 Dapil, dan Kabupaten Sumenep memiliki 7 Dapil.
2. Memilih 1 Dapil dari masing-masing kabupaten di Pulau Madura secara acak, selanjutnya akan dipilih untuk kedua kalinya secara acak 1 kecamatan yang termasuk dalam Dapil tersebut. Berikut adalah hasil dari undian yang dilakukan secara *random*/acak :
 - Kabupaten Bangkalan : Dapil 6 yang berlokasi di Kecamatan Tanah Merah
 - Kabupaten Sampang : Dapil 6 yang berlokasi di Kecamatan Camplong
 - Kabupaten Pamekasan : Dapil 5 yang berlokasi di Kecamatan Galis
 - Kabupaten Sumenep : Dapil 2 yang berlokasi di Kecamatan Saronggi

1.7.3 Populasi Penelitian

Populasi dapat didefinisikan sebagai himpunan dari semua unit observasi yang dipilih oleh peneliti, populasi dibedakan menjadi dua jenis yaitu populasi target dan populasi sampel (Agung, 1992). Pada umumnya populasi target memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pada populasi sampel, dalam artian ini dari mana sesungguhnya sampel itu dipilih maupun diambil. Dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan daerah generalisasi yang mencakup objek maupun subjek yang memiliki karakteristik dan kualitas yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti (Sugiyono, 2018). Populasi dari penelitian ini adalah pemilih pemula di Pulau Madura, menurut Komisi Pemilihan Umum di Bandung menyatakan bahwa pemilih pemula adalah mereka yang kisaran usianya 17 tahun sampai dengan 21 tahun yang telah lulus dari bangku SMA maupun yang sedang duduk di bangku perkuliahan semester awal, dan telah mendapatkan sosialisasi terkait urgensi pemilihan umum dari KPU kabupaten/kota. Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, diketahui populasi penelitian secara keseluruhan sebanyak 3.019 pemilih pemula, dengan rekapitan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pemilih Pemula (17-21 tahun)

Daerah Pemilihan dan Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih Pemula
Kabupaten Bangkalan, Dapil 6: Kecamatan Tanah Merah	848 Orang
Kabupaten Sampang, Dapil 6: Kecamatan Camplong	412 Orang
Kabupaten Pamekasan, Dapil 5: Kecamatan Galis	793 Orang
Kabupaten Sumenep, Dapil 2: Kecamatan Saronggi	966 Orang
Total dari keseluruhan	3.019 Orang

Sumber: (KPU Madura, 2021)

1.7.4 Teknik Pengambilan Sampel

Sampel yaitu bagian dari karakteristik yang dipunyai oleh suatu populasi tersebut. Jika populasinya cukup luas, peneliti tidak sanggup untuk mempelajarinya karena terbatas oleh waktu, dana, dan tenaga, maka peneliti bisa menggunakan sampel yang berada di populasi tersebut. Teknik yang digunakan peneliti untuk pengambilan sampel yaitu teknik *systematic random sampling* (Bungin, 2001). Peneliti menggunakan teknik *systematic random sampling* dengan alasan sebagai berikut:

1. Populasi yang cukup besar pada penelitian ini terdiri dari 4 kecamatan yang mewakili 4 kabupaten di Pulau Madura dengan jumlah pemilih pemula yang beragam, dan sampel yang akan dipilih dengan teknik *systematic random sampling* akan tersebar merata dalam populasi yang telah ditentukan peneliti sehingga informasi yang didapatkan beragam.
2. Terdapat kriteria dari sampel yang disusun oleh peneliti berupa jumlah data pemilih pemula di setiap kecamatan yang tercantum pada Dapil yang telah ditentukan peneliti secara acak (*random*), pemilih pemula di Pulau Madura yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan kriteria berusia 17-21 tahun, dan memiliki hak suara dalam pemilihan umum.
3. Terdapat kerangka sampel berupa daftar pemilih pemula di setiap Dapil yang telah ditentukan peneliti, namun segala hal yang berkaitan dengan data pribadi sangat dirahasiakan seperti NIK, nomor *handphone*, alamat rumah lengkap, dan lain

sebagainya. Sehingga sampel penelitian dipilih berdasarkan urutan numerik atau nomor urut, tidak dengan urutan alfabetis (Agung, 1992; Sugiyono, 2018).

4. Peneliti menggunakan teknik *systematic random sampling* karena dapat mengurangi subjektivitas dari penelitian ini dan lebih mudah untuk digunakan oleh peneliti.

Keterwakilan populasi penelitian ini menggunakan rumus Yamane dalam Purnomo (2017) dalam menentukan sampel penelitian, sebagai berikut:

$$n = N/N(d)^2 + 1$$

Keterangan:

n: Jumlah sampel yang dicari

N: Jumlah populasi (jumlah pemilih pemula di 4 kecamatan dari perwakilan setiap kabupaten yang terpilih secara acak)

d: Nilai presisi yang telah ditetapkan yaitu 10% (0,1)

$$n = N/N(d)^2 + 1$$

$$n = 3.019/3.019 (0,1)^2 + 1$$

$$n = 3.019/3.019(0,01) + 1$$

$$n = 3.019/31,19$$

$$n = 96,79 \text{ jika dibulatkan menjadi } 100$$

Setelah dilakukan penentuan untuk batas minimum sampel yang harus terpenuhi, kemudian dilanjutkan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *proportional random sampling* untuk setiap Dapil dan kecamatan yang terpilih. Sugiyono (2018) menyatakan bahwa teknik *proportional random sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan cara acak tanpa memperhatikan dan melihat tingkatan atau strata dalam populasi tersebut. Dapat disimpulkan teknik *proportional random sampling* digunakan agar nanti didapatkan sampel yang representatif dari masing-masing proporsi jumlah populasinya (Kumar & et al., 2011; Iliyasu & Etikan, 2021). Dari hasil perhitungan batas minimal sampel yang harus terpenuhi adalah 96,79 jika dibulatkan menjadi 100 responden. Maka, kemudian akan dilakukan penentuan jumlah sampel pada setiap Dapil di kecamatan yang terpilih untuk diteliti. Jumlah sampel tersebut didapatkan dengan menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$N = n/S \times n_i$$

N : Jumlah sampel tiap Dapil

n : Jumlah populasi tiap Dapil

ni : Jumlah sampel keseluruhan

S : Jumlah populasi di semua Dapil

Hasil yang didapat dari masing-masing perhitungan *proportional random sampling* adalah sebagai berikut:

Kabupaten Bangkalan, Dapil 6: Kecamatan Tanah Merah = $848/3019 \times 100 = 28$

Kabupaten Sampang, Dapil 6: Kecamatan Camplong = $412/3019 \times 100 = 14$

Kabupaten Pamekasan, Dapil 5: Kecamatan Galis = $793/3019 \times 100 = 26$

Kabupaten Sumenep, Dapil 2: Kecamatan Saronggi = $966/3019 \times 100 = 32$

Tabel 1.2 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

Daerah Pemilihan dan Nama Kecamatan	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
Kabupaten Bangkalan, Dapil 6: Kecamatan Tanah Merah	848 Orang	28 Responden
Kabupaten Sampang, Dapil 6: Kecamatan Camplong	412 Orang	14 Responden
Kabupaten Pamekasan, Dapil 5: Kecamatan Galis	793 Orang	26 Responden
Kabupaten Sumenep, Dapil 2: Kecamatan Saronggi	966 Orang	32 Responden
Total dari keseluruhan	3.019 Orang	100 Responden

Sumber: data sekunder diolah

Pada penelitian ini menggunakan 100 sampel dengan mengambil responden pemilih pemula di setiap kecamatan yang telah ditentukan menggunakan perhitungan *proportional random sampling*, sehingga didapatkan dari setiap kecamatan dengan sampel yang jumlahnya berbeda. Penggunaan sebanyak 100 sampel dalam penelitian ini sejalan dengan pendapat Purnomo (2017) yang menyatakan bahwa penelitian yang berkaitan dengan statistik atau perhitungan sekurang-kurangnya adalah sebanyak 30 sampel, didukung dengan Sugiyono (2018) yang menyatakan bahwa jumlah sampel yang layak digunakan dalam penelitian sebanyak 30-500 sampel. Berlandaskan pada pendapat ahli tersebut, alasan peneliti mengambil 100 sampel pada penelitian ini.

Dikarenakan pada saat peneliti sedang melakukan penelitian berpapasan dengan masa pandemi Covid-19, maka pengambilan sampel penelitian dilakukan secara daring melalui penyebaran kuesioner dengan *google form*. Penambahan kuota dilakukan oleh peneliti dengan persentase sebesar 200% atau sekitar 200 sampel, dikarenakan peneliti khawatir akan angket ataupun kuesioner yang tidak dapat kembali seutuhnya atau terjadi kekurangan dalam pengambilan sampel penelitian. Pada akhirnya peneliti mendapatkan sampel sebanyak 160, dengan rincian yaitu Kecamatan Tanah Merah sebanyak 30 responden, Kecamatan Camplong sebanyak 27 responden, Kecamatan Galis sebanyak 52 responden, dan Kecamatan Saronggi sebanyak 51 responden. Jumlah responden yang melebihi perhitungan sampel di awal, tidak banyak berdampak pada langkah-langkah selanjutnya. Hal ini berlandaskan pada pernyataan Agung (1992) yang menyatakan bahwa pada dasarnya sampel digunakan untuk mempelajari karakteristik dari populasi sampel tersebut, mengingat sampel merupakan bagian terkecil dari populasi sehingga dibutuhkan sampel yang cukup banyak untuk memperbesar kemungkinan sifat representatif dari sampel penelitian.

Selanjutnya dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan langkah-langkah pemilihan *systematic random sampling*, dengan menghitung sampel sebanyak empat kali berdasarkan Dapil yang terpilih. Sehingga proses pemilihan sampel pada penelitian ini dipaparkan sebagai berikut:

1. Menetapkan interval pemilihan sampel (I), dengan cara membagi jumlah populasi (N) di Dapil tertentu dengan jumlah sampel (n) yang diambil di Dapil tertentu, hasil perhitungan sebagai berikut:
 - a. Kabupaten Bangkalan, Dapil 6: Kecamatan Tanah Merah

$$I = N/n = 848/28 = 30,28 = 30$$
 - b. Kabupaten Sampang, Dapil 6: Kecamatan Camplong

$$I = N/n = 412/14 = 29,43 = 29$$
 - c. Kabupaten Pamekasan, Dapil 5: Kecamatan Galis

$$I = N/n = 793/26 = 30,5 = 31$$
 - d. Kabupaten Sumenep, Dapil 2: Kecamatan Saronggi

$$I = N/n = 966/32 = 30,19 = 30$$
2. Responden dipilih dengan cara mengambil lotre secara random, pada Dapil 6 Kecamatan Tanah Merah diambil secara random urutan 1-30, untuk Dapil 6

Kecamatan Camplong diambil secara random urutan 1-29, untuk Dapil 5 Kecamatan Galis diambil secara random urutan 1-31, dan untuk Dapil 2 Kecamatan Saronggi diambil secara random urutan 1-30. Hasil lotre pertama didapatkan angka 5 pada Dapil 6 Kecamatan Tanah Merah, angka 16 pada Dapil 6 Kecamatan Camplong, angka 3 pada Dapil 5 Kecamatan Galis, dan angka 7 pada Dapil 2 Kecamatan Saronggi. Langkah ini dilakukan berulang dengan cara menjumlahkan hasil lotre pertama dengan interval sampel di setiap Dapil, sampai menyentuh batas jumlah populasi dan batas jumlah sampel yang diambil setiap Dapil.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian, menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari data yang terkumpulkan melalui instrumen atau kuesioner, model dari instrumen penelitian menggunakan pertanyaan tertutup (*close ended questions*) (Agung, 1992). Penggunaan dari pertanyaan tertutup untuk memberikan kemudahan kepada responden untuk memberi tanda jawaban atau memilih jawaban yang sesuai, berguna untuk mengategorikan jawaban yang diperoleh agar lebih terfokus dan bulat, sehingga tidak meluas pada topik bahasan yang lainnya.

Data sekunder dapat diperoleh dengan beberapa cara, di antaranya:

1. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data yang berkenaan dengan proses kerja, perilaku manusia, gejala-gejala alam (Sugiyono, 2018). Dalam artian ini, metode pengumpulan data dengan observasi dilakukan oleh peneliti untuk mencatat maupun menyaksikan secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti lebih memahami situasi dari permasalahan atau fenomena yang dilakukan responden di lokasi penelitian.
2. Wawancara (*Interview*), teknik pengumpulan data ini digunakan sebagai informasi tambahan terkait dengan hasil dari kuesioner atau instrumen jika membutuhkan informasi tambahan maupun pendukung, sehingga sifat dari teknik pengumpulan data ini sebagai pendukung data yang telah diperoleh.
3. Studi literatur, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melengkapi dan mendukung topik yang dibahas dengan data yang ada, dan mengacu pada teori, konsep, maupun penelitian terdahulu yang didapatkan dari artikel,

jurnal, laporan penelitian, dan buku sehingga hasil analisis menjadi kaya akan data.

1.7.6 Teknik Pengolahan Data

Sesudah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan pada data tersebut. Berikut beberapa cara dalam mengolah data, penelitian ini dilakukan dengan proses pengolahan data yang terdiri dari tiga tahapan:

1. Editing

Tahap ini merupakan tahap pengecekan atau pemeriksaan data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner atau instrumen penelitian terkait dengan data yang diberikan oleh responden, jawaban responden apakah sudah relevan, lengkap, dan sesuai. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir ketidaksesuaian data yang terkumpul di lapangan.

2. Coding

Tahap ini merupakan tahap pembuatan atau pemberian kode pada data yang telah dikumpulkan baik dalam bentuk huruf maupun angka. Tahapan coding berguna untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, biasanya menggunakan kode berdasar pada keputusan peneliti dan gaya peneliti sehingga dapat dianalisis dan dipahami sesuai keadaan yang terjadi di lapangan.

3. Tabulating

Pada tahap terakhir, akan ditampilkan tabulasi terhadap data yang telah berkode dalam bentuk grafik atau tabel atau daftar dari suatu data yang berguna untuk mempermudah dalam menganalisis dan mengevaluasi. Tabulasi data ini menggunakan *software* SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) 18.0 untuk statistik deskriptif yang ditampilkan dalam bentuk tabel frekuensi.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan cara menjelaskan atau mendeskripsikan hasil temuan dari lapangan yang berkaitan dengan konsep maupun teori dan menganalisisnya, kemudian menampilkan dalam bentuk tabel tunggal. Tabel tunggal berisikan satu variabel penelitian yang sesuai pengolahan data dari kuesioner. Penelitian secara deskripsi bertujuan memberikan gambaran maupun visualisasi yang

akurat dan relevan dengan permasalahan atau fenomena yang diangkat peneliti yaitu tingkat literasi politik pemilih pemula dalam kontestasi pemilu di Madura.

Pemaparan terkait tingkat literasi politik dilakukan secara deskriptif dari data yang terkumpul dan dimensi, antara lain Pengetahuan Sipil, Keterampilan Sipil, dan Sikap Sipil yang digunakan untuk memahami sejauh mana Tingkat Literasi Pemilih Pemula dalam Kontestasi Pemilu di Madura, dan dimensi mana yang paling tinggi dalam menentukan tingkat literasi politik pemilih pemula.

Analisis data menggunakan pengukuran skala *likert* dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden dan diminta untuk memilih pilihan jawaban yang tersedia di setiap pertanyaan. Penelitian ini juga menggunakan *scoring* pada sejumlah pilihan jawaban untuk mengukur tingkat literasi politik pemilih pemula dalam kontestasi pemilu di Madura, *scoring* yang telah ditetapkan yaitu skor 1 untuk “sangat tidak setuju”, skor 2 untuk “tidak setuju”, skor 3 untuk “netral”, skor 4 untuk “setuju”, dan skor 5 untuk “sangat setuju”.

Pada tahapan selanjutnya setelah dilakukan *scoring* di setiap jawaban, adalah memberikan kategori pada penilaian jawaban responden terkait tingkat literasi politik. Tingkatan kategori tersebut, di antaranya sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Dapat dinyatakan dalam penggunaan rumus sebagai berikut:

$$\text{Interval} = \text{Skor tertinggi} - \text{skor terendah} / \text{jumlah kategori} = 5 - 1 / 5 = 0,8$$

Dari perhitungan di atas dapat dinyatakan kategori nilai untuk masing-masing jawaban responden:

Tabel 1.3 Kategori Skor

Rentang Skor	Kategori
1,00 – 1,80	Sangat Rendah
1,81 – 2,60	Rendah
2,61 – 3,40	Sedang
3,41 – 4,20	Tinggi
4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

Sumber: Data Olahan Peneliti